

## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

Miardi Nurzen  
miardinurzen@gmail.com  
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) SURABAYA

### ABSTRACK

The purpose of this research is to test the economic growth, Local Own-Source Revenue, and General Allocation Fund has an influence to the Capital Expenditure at the Districts /Cities Government in East Java. The population of this research is the entire of districts /cities in the area of East Java Province. The data uses secondary data which has been retrieved from the Districts / Cities Realization Budget Report in East Java Province from 2012 to 2014. The data analysis instrument has been done by using multiple linear regressions analysis. Based on the test it shows that: 1) the economic growth does not have any influence to the Capital Expenditure; 2) The Local Own Source Revenue has positive influence to the Capital Expenditure; 3) General Allocation Fund has positive influence to the capital expenditure.

Keywords: Economic Growth (PE), Local Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), capital expenditure (BM).

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk munguji apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2014. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linier Berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal (BM)

### PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tata kelola pemerintahan daerah memasuki era baru. Setiap provinsi dan daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam perkembangannya, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU Nomor 32 tahun 2004. Hal tersebut semakin mengukuhkan peluang Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola serta memanfaatkan segala Sumber Daya yang dimiliki secara efektif dan efisien agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan disetiap lapisan masyarakat.

Penerapan Otonomi Daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena hal tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan keuangan daerahnya sendiri serta membuat kebijakan yang mampu mempengaruhi kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi, dengan mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004: 46).

Penetapan UU Nomor 23 tahun 2014 memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pelayanan publik dapat semakin memuaskan.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 mempertegas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang biasa disebut transfer. Dana perimbangan tersebut berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah atas bagi hasil pajak pusat. Selain itu, pemerintah daerah memiliki pendanaan mandiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada Pemda (Prakoso, 2004: 32).

Namun dalam praktik yang berjalan, transfer dari pemerintah pusat menjadi sumber pendanaan utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasionalnya (Sidik et al, 2002). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standard pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini bertujuan untuk meningkatkan aset tetap yang berupa peralatan, bangunan, infrastruktur. Semakin tinggi investasi modal diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Dalam APBD, anggaran belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah sebaiknya merubah komposisi belanjanya. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2005: 70).

Dewasa ini, kenyataannya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dalam penerimaan APBD sangat rendah, sedangkan pada Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan peranan atas Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan daerah menjadi kecil yang mana seharusnya PAD menjadi sumber utama untuk membiayai pelaksanaan kegiatan daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

## TINJAUAN TEORETIS

### Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dalam undang-undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan

bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

### Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan pengertian Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya (Mardiasmo, 2002: 132). Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan.

Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya: Pertama, Pajak Daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah yang termasuk goongan ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan. Kedua, Retribusi Daerah, Retribusi daerah menurut UU Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ketiga, Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah. Keempat, Lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bias dengan menerbitkan obligasi daerah.

### Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa: Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat block grant, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

### Belanja Modal

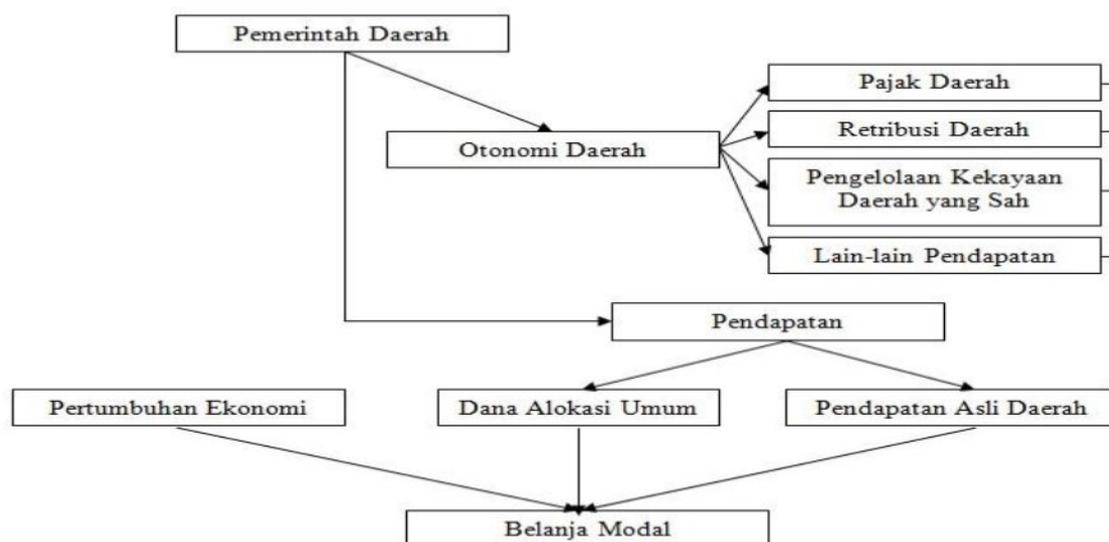
Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum (Halim, 2012: 74). Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1): Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Belanja Modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53, belanja modal terdiri atas pengadaan: Pertama, Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Kedua, Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Ketiga, Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasandan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Keempat, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Kelima, Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/

peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

#### Rerangka Pemikiran



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

#### Pengembangan Hipotesis

##### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa: Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, bila Pertumbuhan Ekonomi baik maka Pemerintah Daerah akan meningkatkan alokasi Belanja Modal untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Seperti yang diungkapkan oleh Devi (2013) bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut menghasilkan hipotesis berikut:

H<sub>1</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

##### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002:47). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa

adanya pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut menghasilkan hipotesis berikut:

H<sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Arwati dan Hidayati (2013) mengemukakan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### Metode Penelitian

#### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) Variabel Dependen yaitu Belanja Modal (BM). (2) Variabel Independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pertumbuhan Ekonomi (PE) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah yang bersumber dari kekayaan wilayah daerah itu sendiri dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan operasionalnya. Belanja Modal (BM) adalah Pengeluaran daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban daerah.

### Teknik Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Normalitas data dapat diuji dengan metode Kolmogorov-Smirnov Jika tingkat signifikansi  $> 0,05$ , maka data tersebut berdistribusi normal. Pendekatan grafik dengan menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot Of Regression Standardized Residual), dengan syarat data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y.

##### Uji Multikolinieritas

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas, yaitu dengan menggunakan nilai TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor). VIF menyatakan tingkat pembengkakan varians. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 berarti terdapat Multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda. Namun, jika nilai VIF-nya lebih rendah dari angka 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala Multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-Watson (Uji DW). Cara pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi bila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik yang dilakukan dengan mengamati scatterplot. Jika scatterplot menyebar secara acak menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk, dan sebaliknya, jika scatterplot membentuk pola tertentu maka menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

### Uji Kesesuaian Model (uji F)

Uji F ini dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (analysis of variance = ANOVA) yang dapat dilihat pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan melihat nilai p-value atau level of significant yaitu 5% atau 0,05. Prosedur pengujian kesesuaian model yaitu sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi (p-value) < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya. Koefisien determinasi R<sup>2</sup> atau Adjusted R<sup>2</sup>(R<sup>2</sup>adj) memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini model regresi yang digunakan adalah Regresi linier berganda yaitu regresi dimana lebih dari satu variabel penjelas, atau variabel bebas yang digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel tak bebas. Adapun model regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$BM = a + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \varepsilon$$

Keterangan : BM = Belanja Modal, a = Konstantan regresi,  $\beta_1; \beta_2; \beta_3$  = Koefisien regresi, PE = Besar Pertumbuhan Ekonomi PAD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah, DAU = Jumlah Dana Alokasi Umum,  $\varepsilon$  = Error term.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Signifikansi (Uji t)

Pengujian hipotesis ini menggunakan Uji t yang dilakukan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  yaitu: (1) Pengujian Hipotesis (H1): Jika nilai signifikansi uji t  $\leq 0,05$  maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). (2) Pengujian Hipotesis (H2): Jika nilai signifikansi uji t  $\leq 0,05$  maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). (3) (H3) : Jika nilai signifikansi uji

$t \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Obyek Penelitian

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di bagian Timur Pulau Jawa. Provinsi yang biasanya disingkat dengan JATIM ini berbatasan dengan Provinsi Bali di sebelah Timurnya dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Baratnya. Di sebelah Utara Provinsi Jawa Timur adalah Laut Jawa, sedangkan sebelah Selatan merupakan Samudera Hindia. Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, di antaranya galangan pembuatann kapal terbesar di Indonesia PT PAL yang terlentak di Surabaya, industri besar kereta api terbesar di Asia Tenggara PT INKA terletak di Madiun, Pabrik kertas (PT Tjiwi Kimia) di Tarik-Sidoarjo, PT Leces di Probolinggo, Pabrik rokok (Wismilak di Surabaya, Gudang Garam di Kediri, Sampoerna di Surabaya). Pada sektor Pertambangan dan Energi, diantaranya Blok Cepu, salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, ditambang di Bojonegoro. Dari data laporan realisasi anggaran APBD tahun 2012 hingga 2014 yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten/kota kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Jawa Timur diperoleh data (n) sebanyak 114 yang diperoleh dari 38 Pemerintah Kabupaten/Kota dikali dengan 3 tahun periode data pengamatan. Data penelitian diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur yang telah diaudit oleh BPK-RI Tahun Anggaran 2012-2014.

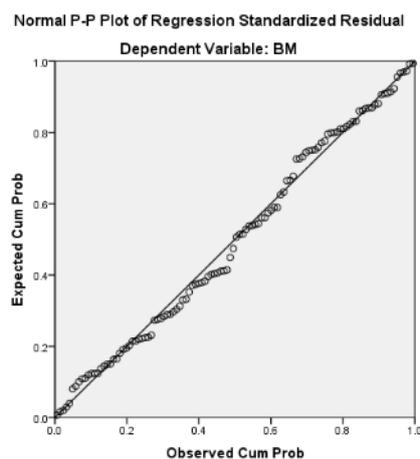
### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Normalitas data dapat menggunakan metode analisis grafik Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kedua metode tersebut:

#### Uji Normalitas Data dengan Analisis Grafik

Pada grafik P-plot distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan distribusi dari data digambarkan dengan plotting. Jika data berdistribusi normal maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Gambar 2 berikut ini menyajikan grafik P-plot yang dapat menggambarkan distribusi data:



Gambar 2  
Grafik P-plot  
Sumber: Output SPSS

Dari grafik normal probability plot diatas setelah dilakukan transformasi data, terlihat bahwa penyebaran titik-titik mengikuti mengikuti arah garis diagonal dan penyebarannya merapat di sekitar garis diagonal yang menunjukkan bahwa data yang diuji telah berdistribusi normal atau model regresi yang digunakan layak dipakai.

#### Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

Pengujian normalitas data dengan analisis grafik memberikan hasil yang subyektif, sehingga kita perlu melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji statistik nonparametrik untuk memastikan apakah data yang diuji telah berdistribusi secara normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			114
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.03662622
Most Extreme Differences	Absolute		.069
	Positive		.069
	Negative		-.062
Test Statistic			.069
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Output SPSS

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal karena nilai signifikansi yang dilihat dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 diatas nilai signifikansi yang telah diasumsikan sebelumnya yaitu sebesar 0,05.

#### Uji Multikolinieritas

Dalam menguji multikolinieritas model regresi dapat menggunakan nilai TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 berarti terdapat multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda. Berikut ini output dari SPSS 23 mengenai hasil analisis multikolinieritas menggunakan nilai VIF:

**Tabel 2**  
**Tabel Uji Multikolinieritas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.120	.021		5.623	.000		
PE	-.160	.158	-.093	-1.015	.312	.912	1.096
PAD	.213	.047	.459	4.487	.000	.732	1.366
DAU	.085	.034	.251	2.547	.012	.791	1.264

Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS

Dari hasil output SPSS yang disajikan pada tabel 2 terlihat bahwa nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari ketiga variabel yaitu PE, PAD dan DAU memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu sebesar 1,096, 1,366 dan 1,264. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel independen.

### Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi di dalam model regresi dengan menggunakan uji Durbin-Watson dengan ketentuan apabila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Tabel 3 akan menunjukkan hasil uji autokorelasi:

**Tabel 3**  
**Uji Autokorelasi**

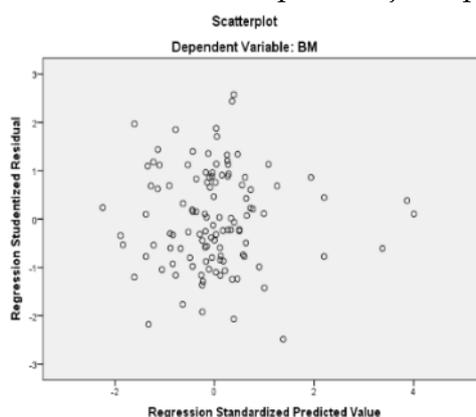
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.397 <sup>a</sup>	.157	.134	.037122	1.242

Sumber: Output SPSS.

Dari tabel 3 terlihat bahwa nilai statistik Durbin-Watson yang dihasilkan sebesar 1,242. Berdasarkan asumsi ketentuan diatas nilai D-W yang dihasilkan berada diantara -2 sampai +2 yang berarti bahwa data yang diuji tidak mengandung atau bebas autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot. Jika scatterplot menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Grafik scatterplot disajikan pada gambar 4 berikut ini:



**Gambar 3**  
**Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan tampilan pada grafik scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Uji Kesesuaian Model (Uji F)

Uji F dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel analisis varian (ANOVA) dari hasil output SPSS dengan menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan kriteria pengujian, jika nilai p-value  $> 0,05$ , maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan, jika nilai p-value  $\leq 0,05$ , maka ada pengaruh yang signifikan. Uji F digunakan untuk menguji apakah secara simultan PE, PAD, DAU berpengaruh terhadap BM. Berikut ini Output hasil perhitungan dari Uji F:

**Tabel 4**  
**Hasil Perhitungan Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.028	3	.009	6.844	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.152	110	.001		
	Total	.180	113			

a. Dependent Variable: BM b. Predictors:(Const), PE, DAU, PAD

Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan tabel ANOVA diatas dapat diketahui bahwa hasil uji F menunjukkan nilai sebesar  $0,000 \leq 0,05$ , berarti ada pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan yang tinggi yaitu variabel-variabel yang digunakan mampu menjelaskan fenomena yang dianalisis dan seluruh variabel independen PE, PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal (BM).

#### Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini besarnya kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh variabel independen yaitu PE, PAD dan DAU terhadap variabel dependennya yaitu BM dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi Adjusted R<sup>2</sup> (R<sup>2</sup>adj). Alasan peneliti menggunakan pengukuran dengan Adjusted R<sup>2</sup>(R<sup>2</sup>adj), karena nilai Adjusted R<sup>2</sup>(R<sup>2</sup>adj) dapat naik dan turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Berikut ini hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5:

**Tabel 5**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.397 <sup>a</sup>	.157	.134	.037122	.157	6.844

Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan analisis diatas diperoleh besarnya Adjusted R Square dengan angka yaitu sebesar 0,1340 atau 13,4% yang berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terhadap Belanja Modal. Sedangkan sisanya sebesar 86,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS 23 diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil estimasi koefisien Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.120	.021			5.623	.000		
PE	-.160	.158	-.093		-1.015	.312	.912	1.096
PAD	.213	.047	.459		4.487	.000	.732	1.366
DAU	.085	.034	.251		2.547	.012	.791	1.264

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS.

Dari hasil output SPSS 23 seperti yang pada tabel 6 diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM = 0,120 - 0,160PE + 0,213PAD + 0,085DAU + \varepsilon$$

## Pengujian Hipotesis Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan output hasil olah data SPSS 23 uji t ditunjukkan dalam tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.120	.021		5.623	.000		
PE	-.160	.158	-.093	-1.015	.312	.912	1.096
PAD	.213	.047	.459	4.487	.000	.732	1.366
DAU	.085	.034	.251	2.547	.012	.791	1.264

a. Dependent Variable: BM

**Sumber: Output SPSS.**

Dari tabel 7 diperoleh nilai t-hitung untuk variabel PE sebesar -1,015 untuk variabel PAD sebesar 4,487 dan untuk variabel DAU sebesar 2,547. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai signifikansi. Pada tabel Coefficients bahwa nilai Sig. dari kedua variabel sebesar 0,000 dimana  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki tingkat signifikansi yang sangat tinggi yang berarti bahwa kedua variabel independen yaitu PAD dan DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 10 diatas menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,160 dan nilai t-hitung sebesar -1,015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,312 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak yang berarti bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Devi (2013), melakukan penelitian terhadap sampel Jawa Tengah pada tahun anggaran 2008-2011 mengungkapkan bahwa PE berpengaruh positif pada belanja modal di Jawa Barat tahun anggaran 2008-2011. Namun dari penelitian ini terlihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan, dimana tabel Coefficients bahwa nilai Sig dari variabel PE sebesar 0,312. Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran. Hal tersebut memungkinkan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki dampak secara langsung dalam jangka pendek, dalam menentukan anggaran Belanja Modal.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 10 diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,213 dan nilai t-hitung sebesar 4,487 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007), melakukan penelitian terhadap sampel se-jawa bali pada tahun anggaran 2004-2005 mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Jawa Bali tahun anggaran 2004-2005. Alasan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal karena Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD mengalami peningkatan maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan menggali potensi-potensi daerah daerah yang dimiliki, salah satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur telah menggunakan PAD secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun peningkatan sarana dan prasarana dengan meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik.

### Pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant, merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Transfer ini merupakan dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah, memungkinkan daerah menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 10 diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,85 dan nilai t-hitung sebesar 2,547 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. penelitian ini sejalan dengan hasil pengujian oleh Arwati dan Hidayati (2013) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa DAU masih dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan anggaran Belanja Modal. Pemerintah Daerah menggunakan DAU sebagai sumber dana untuk mengelola Pemerintah daerahnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana

Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada tahun 2012-2014 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah di Masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki kebijakan dalam membuat anggaran Belanja Modal, hal tersebut memungkinkan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki dampak secara langsung dalam jangka pendek, dalam menentukan anggaran Belanja Modal. Kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin meningkat pula Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan sumber daya daerah itu sendiri. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan ukuran kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di daerah. Ketiga, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti apabila Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan, hal tersebut menyebabkan peningkatan pada Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pula.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada tahun 2012-2014 maka Penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya lewat Otonomi Daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur harus mampu menggali sumber-sumber kekayaan daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan cara memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta mengeksplorasi sumber daya di Daerahnya. Kedua, Dikarenakan data yang digunakan data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Timur sehingga belum dapat menggambarkan secara detail tentang ketergantungan masing-masing Pemerintah daerah akan Dana Alokasi Umum yang lebih besar daripada Pendapatan asli daerah beserta kebijakan yang diambil oleh masing-masing Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lapangan atau eksperimen dengan subjek eksekutif dan legislatif daerah. Ketiga, Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum dicantumkan dalam penelitian ini misalnya saja variabel SILPA, kebijakan pemerintah atau Dana Bagi Hasil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, D. dan N. Hidayati. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Seminar Nasional, Universitas Widyatama Bandung, Semarang.
- Bastian, I. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Buku 1. BPR RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- \_\_\_\_\_. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Buku 1. BPR RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- \_\_\_\_\_. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Buku 1. BPR RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Yogyakarta.
- Devi, P. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2008-2011). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halim, A. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian keempat Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum.
- Prakoso, K. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (DAU) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI. Vol. 8 (2):101-118.
- Sidik, M. R. Mahi. dan B. Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- DPR RI. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- DPR RI. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Desentralisasi Fiskal.
- DPR RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- DPR RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- DPR RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- DPR RI. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.